

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Otonomi Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

##### **1) Pengertian Manajemen**

Manajemen sebagai ilmu seperti yang diungkap Fatah (2000:25) didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Menurut Chosanah (1994:45) manajemen adalah bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya, agar usaha yang sedang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. George R. Terry di dalam bukunya *The Principles of Management* yang dikutip Chosanah (1994) mengemukakan manajemen sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain atau ada usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Manajemen dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *the act or art to managing conduct, direction and control, yaitu tindakan atau seni pengurusan*, pengaturan, pengarahan dan pengawasan. Definisi AECT 1977 membagi fungsi manajemen organisasi dan manajemen personalia sebagaimana dipraktekkan oleh administrator pusat dan program media. Manajemen melibatkan pengontrolan Teknologi Pembelajaran melalui perencanaan, organisasi, koordinasi, dan supervisi.

Manajemen merupakan produk sistem nilai operasional. Kompleksitas manajemen sumber daya, personal dan desain, dan upaya pengembangannya teruntai

dalam besarnya intervensi yang tumbuh dari departemen perusahaan atau departemen lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah manajemen memiliki banyak arti yang semuanya menunjukkan suatu kegiatan bersama. Selain itu ilmu manajemen dapat direalisasikan dalam semua aspek kehidupan. Begitu juga dengan manajemen proyek, dalam hal ini manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengontrol fungsi-fungsi desain pembelajaran atau tipe proyek yang lain. Mereka harus melakukan negosiasi, pembiayaan, menetapkan sistem monitoring informasi dan mengevaluasi kemajuan.

## **2) Manajemen Sekolah**

Manajemen sekolah seringkali diartikan sebagai administrasi sekolah. Dalam berbagai kepentingan, pemakaian istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, demikian halnya dalam berbagai literatur, acapkali dipertukarkan. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.

Made Pidarta (1988:12) mengungkapkan sesudah manajemen membuahkan aktivitas-aktivitas tertentu dalam lembaga pendidikan dengan program-programnya, sarannya, anggarannya, kriteria pelaksanaan dan keberhasilan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan, maka proses pendidikan dilaksanakan. Kesimpulan yang diperoleh dari uraian di atas adalah manajemen sekolah merupakan manajemen yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sekolah. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sekolah harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

## **3) Manajemen Berbasis Sekolah**

Mulyasa (2002: 11) mengungkapkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah. Untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Menurut buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (2002:3) mengartikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai bagian dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional.

Bank Dunia yang dikutip Mulyasa (2000:12) memberi pengertian bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian di atas adalah manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk manajemen sekolah yang memiliki kewenangan lebih besar dari sebelumnya dan esensinya adalah pengambilan keputusan partisipatif untuk memperoleh mutu yang lebih baik.

#### 1. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi.

## 2. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Mulyasa (2000:12) mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah mengkaji beberapa faktor yang perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah yaitu:

### a. Kewajiban Sekolah

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban, monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah.

### b. Kebijakan dan Prioritas Pemerintah

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka (*literacy and numeracy*), efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis dalam hal ini.

### c. Peranan Orangtua dan Masyarakat

Manajemen berbasis sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dan hal ini merupakan salah satu aspek yang penting. Melalui dewan sekolah (*school council*), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan.

d. Peranan Profesionalisme dan Manajerial

Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat sekolah didasarkan atas pertimbangan pendidikan.

e. Pengembangan Profesi

Agar sekolah dapat mengambil manfaat yang ditawarkan manajemen berbasis sekolah, perlu dikembangkan adanya pusat pengembangan profesi, yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk manajemen berbasis sekolah.

#### **4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah**

Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Sekolah yang ingin berhasil dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, maka sejumlah karakteristiknya perlu dimiliki. Menurut buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (2002: 11) mengemukakan karakteristiknya sebagai berikut:

### 1. Output yang Diharapkan

Output adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya.

### 2. Proses

Proses yang dimaksudkan adalah : (a). Efektifitas Proses Belajar Mengajar yang Tinggi (b). Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat (c). Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib (d). Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang Efektif. (e). Sekolah Memiliki Budaya Mutu (f). Sekolah Memiliki ”*Team Work*” yang Kompak, Cerdas dan Dinamis (g). Sekolah Memiliki Kewenangan /Kemandirian (h). Partisipasi Warga Sekolah dan Masyarakat (i). Sekolah Memiliki Keterbukaan (Transparansi) (j). Sekolah Memiliki Kemampuan untuk Berubah (k). Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan (l). Sekolah Responsif dan Antisipatif Terhadap Kebutuhan (m). Sekolah Memiliki Komunikasi yang Baik (n). Sekolah Memiliki *Akuntabilitas* (o). Sekolah Memiliki *Suistainabilitas*

### 3. Input Pendidikan

Input pendidikan yang dipersyaratkan adalah : (a). Memiliki Kebijakan Mutu (b). Sumber Daya Tersedia Lengkap (c). Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi

(d). Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi (e). Fokus pada Pelanggan (f). Input Manajemen

Buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah menyebutkan jika sekolah ingin sukses melaksanakan manajemen berbasis sekolah, maka sekolah perlu memiliki karakteristik manajemen berbasis sekolah.

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian di atas adalah pendekatan yang digunakan dimulai dari output dan diakhiri dengan input mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari output. Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasinya.

#### **6. Tahap-Tahap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.**

Menurut buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi.
2. Mengidentifikasi Tantangan Nyata Sekolah.
3. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah (Tujuan Situasional Sekolah).
4. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai Sasaran.
5. Melakukan Analisis SWOT ( *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*).
6. Alternatif Langkah Pemecahan Persoalan.
7. Menyusun Rencana dan Program Peningkatan Mutu.
8. Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu.
9. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan.
10. Merumuskan Sasaran Mutu.

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian diatas adalah pelaksanaan manajemen berbasis sekolah harus melalui tahap-tahap yang urut dan berkesinambungan. Keberhasilan melalui tahap-tahap ini akan membantu pencapaian keberhasilan program.

## **7. Fungsi-Fungsi yang Didesentralisasikan ke Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah**

Menurut buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah mengungkapkan bahwa fungsi-fungsi yang dapat digarap oleh sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah meliputi:

1. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar
2. Perencanaan dan Evaluasi
3. Pengelolaan Kurikulum
4. Pengelolaan Ketenagaan
5. Pengelolaan Fasilitas
6. Pengelolaan Keuangan
7. Pelayanan Siswa
8. Hubungan Sekolah dan Masyarakat
9. Pengelolaan Iklim Sekolah

Menurut Hasbullah (2006: 75) bahwa :

Manajemen Berbasis Sekolah/MBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwasan lebih besar kepada kepala sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dan untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka Pendidikan Nasional. Karena itu esensi MBS = Otonomi Sekolah + Fleksibilitas+ partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah.

Pada bagian lain Brown seperti dikutip Hasbullah (2006:76) menjelaskan bahwa: "karakteristik utama MBS mencakup otonomi, fkesibilitas, responsibilitas,

perencanaan, deregulasi sekolah, partisipasi lingkungan sekolah, kolaborasi dan kepedulian kepala sekolah dan warga sekolah”.

Kesimpulan yang dapat diambil dari poin diatas adalah otonomi sekolah lebih mengutamakan kewenangan dan kemandirian sekolah untuk dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan di sekolah karena sekolah yang lebih mengetahui kondisinya sendiri.

## **B. Otonomi Sekolah dalam Pengambilan Keputusan**

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelola pendidikan yang profesional. Pelaksanaannya juga memerlukan seperangkat kewajiban, disertai dengan monitoring dan tuntutan pertanggung jawaban yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Sekolah juga dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.

Menurut Danim (2008:229) bahwa konsep manajemen pendidikan modern menggariskan tentang efektifitas manajemen sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan manajernya dalam membuat keputusan-keputusan bermutu yang diperoleh melalui langkah-langkah sistematis. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan direalisasikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan

efektivitas kinerja. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di sekolahnya tersebut.

Menurut Mulyasa (2000: 42) kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen berbasis sekolah dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif.
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan.
4. Berhasil menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.
5. Mampu bekerja dengan tim manajemen.
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kimball Wiles yang dikutip Soewadji Lazaruih (1987) menyebutkan ada 5 keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu:

1. Keterampilan dalam kepemimpinan.
2. Keterampilan dalam hubungan manusiawi.
3. Keterampilan dalam proses kelompok.
4. Keterampilan dalam administrasi personalia.
5. Keterampilan dalam menilai staf.

Manajemen sekolah yang baik adalah mampu menghasilkan keputusan secara bermutu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keputusan manajemen sekolah yang dimaksudkan adalah harus memiliki akses yang dinamis dan inovatif (Danim, 2008:230). Implementasi keputusan dalam otonomi sekolah antara lain Keputusan

melalui Gugus Mutu (GM), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

Pengambilan Keputusan secara efektif merupakan tolok ukur kinerja kepemimpinan yang efektif baik yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembelajaran, ketenagaan, pembinaan peserta didik, pengelolaan keuangan, maupun penataan kelembagaan dalam meningkatkan mutu sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertanggung jawab dalam keefektifan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan dan hubungan masyarakat (Masaong dan Tilome, 2011:203).

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian diatas adalah kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang mempunyai tugas besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja, kerjasama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan mutu yang profesional diantara para guru banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah juga harus mampu menolong stafnya untuk memahami tujuan bersama yang akan dicapai. Ia harus memberi kesempatan kepada staf untuk saling bertukar pendapat dan gagasan sebelum menetapkan tujuan.

Kepala sekolah juga menjadi pemimpin yang bertugas dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di sekolah. Ia menjalankan fungsi sebagai administrator, yaitu mengusahakan dan mengembangkan pelbagai fasilitas sehingga situasi belajar

mengajar yang baik dapat berlangsung. Kepala sekolah juga dituntut persiapan dan pengalaman pendidikan yang cukup, selain kemampuannya untuk memimpin.

### **C. Implementasi Otonomi Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan**

Dalam konteks pembiayaan pendidikan dalam otonomi sekolah maka yang dibicarakan pada hakikatnya adalah manajemen keuangan sekolah. Menurut Rohiat (2009:27) bahwa pendidikan membutuhkan biaya yang banyak. Keuangan atau pembiayaan pendidikan menjadi faktor esensial. Penanggung jawab manajemen pembiayaan adalah Kepala sekolah dan guru yang juga turut bertanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan.

Lebih lanjut Rohiat (2009) menjelaskan bahwa manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan, sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan terutama pengalokasian penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan (*income generating activities*) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah (Rohiat, 2009:66)

#### **D. Otonomi Sekolah dalam Pengelolaan Pembelajaran.**

Manajemen berbasis sekolah memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pemberian kebebasan yang lebih luas juga memberikan kemungkinan kepada guru untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik di lingkungan sekolah.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar mengajar juga merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Wrightman yang dikutip Uzer Usman (1992: 1) mengungkapkan bahwa peran guru adalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Menurut Watten. B yang dikutip Sahertian (1994: 14) mengungkapkan bahwa peranan guru antara lain:

1. Sebagai tokoh terhormat dalam masyarakat sebab ia nampak sebagai seorang yang berwibawa.
2. Sebagai penilai ia memberi penilaian.
3. Sebagai seorang sumber yang berperan memberi ilmu pengetahuan.
4. Sebagai obyek identifikasi.
5. Sebagai penyangga dari rasa takut dan orang yang menolong memahami diri.
6. Sebagai pemimpin kelompok.
7. Sebagai orang tua atau wali.
8. Sebagai orang yang membina dan memberi layanan.
9. Sebagai kawan sekerja dan pembawa rasa kasih sayang.

Menurut Usman (1992:15) peranan guru yang paling dominan adalah sebagai berikut:

1. Guru sebagai Demonstrator

Guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya dan senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan dapat menentukan hasil belajar yang dicapai siswa.

2. Guru sebagai Pengelola Kelas

Guru hendaknya mampu mengelola kelas, karena kelas merupakan lingkungan belajar dan suatu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Pengawasan terhadap lingkungan menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang kondusif.

3. Guru sebagai Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media merupakan alat komunikasi guru yang berguna untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.

4. Guru sebagai Evaluator

Penilaian perlu dilakukan karena dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar.

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian diatas adalah guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan

secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.